

**Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang**

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan*

SKRIPSI



Oleh :

Balgis

202010050311175

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2023

RELASI KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA LANDUNG SARI
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Diajukan Oleh:

BALGIS
202010050311175

Telah disetujui
Pada hari / tanggal, *Selasa /14 Mei 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.I.P., M.A

Pembimbing

Prof. Dr. Asen Nurjaman, M.Si

Mengetahui



SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BALGIS
202010050311175

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Selasa, 14 Mei 2024
Dihadapan Dewan Pengaji

Dewan Pengaji:

1. Dr. Salahudin, S.I.P., M.Si., M.P.A ()
2. Iradhad Taqwa Sihidi, S.I.P., M.A ()
3. Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si ()

Mengetahui
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Balgis
NIM : 202010050311175
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :

Relaasi Kerja Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Februari 2024
Yang Menyatakan,



BALGIS



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 400 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 249 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 400 435
E. webmaster@umm.ac.id



**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang**. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama	: Balgis
NIM	: 202010050311175
Judul TA/Skripsi	: Relasi Kerja Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Merumuskan	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Pembimbing I	: Prof. Dr Asep Nurjaman, M.Si

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
	5%	7%	14%	1%	0%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**RELASI KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**". Penulisan dan penelitian ini dilakukan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh staff dan jajaran Rektorat atas ilmu dan bimbingan selama kuliah.
2. Prof. Dr, Muslimin Machmud, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh staff dan jajarannya atas ilmu dan bimbingan selama kuliah.
3. Muhammad Kamil, S.I.P., MA selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan beserta staff dan jajarannya atas ilmu dan bimbingan selama kuliah.
4. Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pimpinan serta perangkat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

6. Kedua orang tua saya, Wikanto dan Yuli Kuswantini yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ketiga kakak saya Prawita Sari, Anton Pranowo, Panji Prasetyo yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan (Ria, Feni, Tita, Amalia, Nindah, Ona) yang telah bersama-sama dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan
9. M Dhani yang telah memberikan support dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Taylor Swift yang telah menemani saya lewat lagu-lagunya
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan yang ada serta berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan.

Malang, 25 April 2024

Penulis

Balgis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.4.3 Manfaat Akademis	7
1.5 Definisi Konseptual	7
1.5.1 Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan BPD	7
1.5.2 Perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).....	9
1.6 Definisi Operasional	11
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.7. 1 Jenis penelitian.....	11
1.7.2 Sumber Data	12
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.7.4 Subjek Penelitian	14
1.7.5 Lokasi Penelitian.....	14
1.7.6 Teknik Analisis Data	15
1.7.7 Jadwal Riset Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Relasi Kerja	20
2.2.2 Pemerintah Desa	20
2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.2.4 Relasi Kerja Pemerintah Desa & BPD	25
2.2.5 Perumusan APBDesa	26
BAB III DESKRIPSI WILAYAH.....	27
3.1 Gambaran Secara Umum	27
3.1.1 Letak Geografis.....	28
3.1.2 Kondisi serta Ciri Geografis Wilayah	28
3.1.3 Sejarah Desa	29
3.2 Demografi/Kependudukan	30
3.3 Pendidikan.....	31
3.4 Mata Pencaharian	32
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	33
3.6 Aspek Sosial Budaya	34
3.7 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Landungsari	35
3.8 Tugas Pokok serta Fungsi	37
3.8.1 Kepala Desa	37
3.8.2 Sekretaris Desa	37
3.8.3 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	38
3.8.4 Kepala Urusan Keuangan	38
3.8.5 Kepala Seksi Perencanaan	38
3.8.6 Kepala Seksi Pemerintahan	39
3.8.7 Kepala Seksi Kesejahteraan.....	39
3.8.8 Kepala Seksi Pelayanan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hubungan Kerjasama Antara Pemerintahan Desa dan BPD	40
4.2 Tahapan Pemerintahan Desa dan BPD dalam merumuskan APBDESA	43
4.2.1 Peraturan Bupati (Perbup) Malang No. 200 Tahun 2022 tentang Pedoman dalam menyusun APBDESA Anggaran 2023	43

4.2.2 Mekanisme dalam Penyusunan APBDESA di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang	51
4.2.3 Proses Pelaksanaan APBDesa	59
4.2.4 Proses Pertanggung Jawaban Pelaporan APBDesa	60
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat pada saat merumuskan APBDesa	61
4.3.1 Faktor Pendukung	61
4.3.2 Faktor Penghambat	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	30
Tabel 3.2 Tamatan Sekolah Masyarakat.....	31
Tabel 3.3 Macam- Macam Pekerjaan dan Jumlahnya.....	33
Tabel 3.4 Nama- Nama Agama dan Pemeluknya.....	33
Tabel 3.5 Daftar Nama Perangkat Desa Landungsari 2019-Sekarang.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jadwal Penelitian.....	16
Gambar 3. 1 Peta Desa Landungsari.....	27
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Landungsari.....	36



ABSTRAK

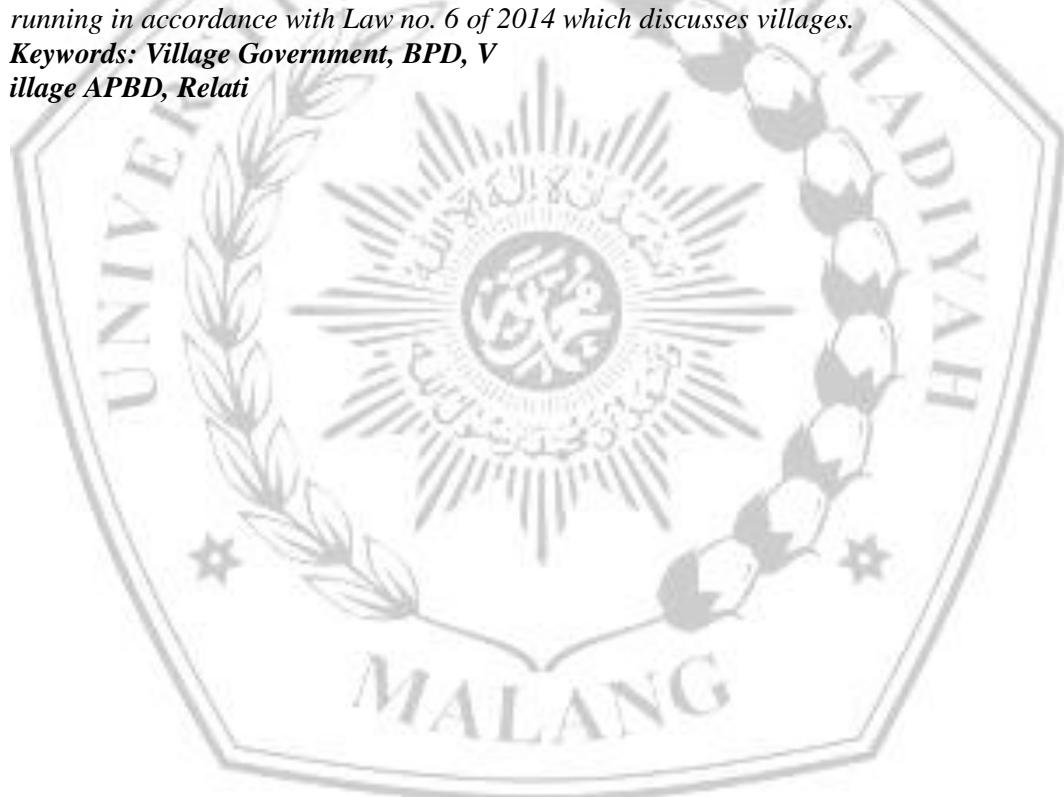
Untuk melaksanakan Pemerintahan Desa, Desa memiliki kekuasaan untuk mengurus sendiri semua urusan dan prioritas warga masyarakatnya. Hal itu tidak jauh berbeda antara daerah dengan pusat berkerjasama dengan lembaga eksekutif serta legislative untuk pembagian kekuasaan. Sama halnya pada tingkat desa, pemerintahan desa tidak dapat menyelesaikan urusannya secara mandiri dan akan dibantu oleh lembaga desa yang disebut dengan BPD. Tujuan dari kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD adalah untuk menyetujui hasil dari program peraturan desa yang bekerja sama dengan Kepala Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus wajib mengeksplorasi seluruh potensi yang dimiliki oleh desa untuk direalisasikan pembangunan di daerah yang nantinya dirumuskan dalam APBDesa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan menggunakan metode kualitatif berupa pendekatan deskriptif mengenai gambaran dan fenomena yang terjadi untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diteliti dengan didasarkan pada fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintahan Desa dengan BPD Landungsari dapat dikatakan sudah baik dalam merumuskan APBDesa. Bahwasanya kerja sama Pemerintahan Desa dan BPD sudah berjalan sesuai UU No. 6 tahun 2014 yang membahas terkait Desa.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, BPD, APBDesa, Relasi

ABSTRACT

To implement Village Government, the Village has the power to manage all the affairs and priorities of its community members themselves. This is not much different between regions and the center in collaboration with executive and legislative institutions to share power. Likewise, at the village level, the village government cannot resolve its affairs independently and will be assisted by a village institution called the BPD. The aim of the collaboration between the Village Government and the BPD is to approve the results of the village regulation program in collaboration with the Village Head. Therefore, the Village Government must be obliged to explore all the potential possessed by the village to realize development in the area which will later be formulated in the Village APBD. This research was carried out at the Landungsari Village Office, Dau District, Malang Regency using qualitative methods in the form of a descriptive approach regarding descriptions and phenomena that occur to be used as a basis for solving a problem that has been researched based on facts in the field. The research results show that the relationship between the Village Government and the Landungsari BPD can be said to be good in formulating the Village APBD. That the cooperation between the Village Government and BPD has been running in accordance with Law no. 6 of 2014 which discusses villages.

Keywords: *Village Government, BPD, Village APBD, Relati*



DAFTAR PUSTAKA

- Almunandar, A., & Muttaqin, Z. (2019). Kerjasama Bpd Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.633>
- Bender, D. (2016). Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2019a). Pemerintahan Desa. *NBER Working Papers*, 1(7), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2019b). Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Partisipasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *NBER Working Papers*, V, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Hasanbasri, M. (2010). *D Esa S Iaga M Ana*. 11, 1–6.
- Heriana, I., Setiawati, R., Misda, S., & Mukhlis, M. (2021). Relasi Makna Antar Kalimat pada Berita Sindonews.com. *Sajak: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Sastra, Bahasa, Dan Pendidikan*, 1(3), 62–67. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>
- Kufeu, K. I. O., Malaka, K., Berek, E. Y., Festianto, D., & Kolne, Y. (n.d.). *Jurnal Poros Politik RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR (STUDI DI DESA BANI-BANI , Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 - 0953*. 41–52.
- Laurentya, V. M. (2018). *Diusulkan untuk Penelitian Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Liando, L. Y., Lambey, L. ., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa

- Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 5(6), 1474–1483.
- Mawarni, N. A. (2018). *Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa* <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5652>
- Munir, A., Sukadji, S., & Mukhlis, H. (2022). *Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. 4.
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Natijah, U., & Khadir, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 58–66. jmiap.ppj.unp.ac.id JURNAL
- Pemerintah RI. (2014). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Undang-Undang Republik Indonesia, Administrasi pemerintahan*, 99.
- Prihambodo, O. G. P. (2018). Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Relasi Kepala Desa*, 1–14.
- Radjikan. (2021). *PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENUNJANG PEMBINAAN DESA (Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)*. 01(1), 1–23.
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa

- Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/35755/22921/>
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33–46. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sukamto, P. (2019). Tinjauan atas Proses Perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Salamrejo, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Jawa Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tjepi F. Aloewir. (2019). Tinjauan Umum Hubungan Kerja. *Jurnal Hubungan Kerja*, 1–39.
- Vinalia, N., Sefitriya, R., & Priyono, N. (2023). Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 115–125.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa

Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.

